

Dinamika Ekonomi Global: Antara Proteksionisme dan Liberalisasi



Rudy C Tarumingkeng

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Guru Besar Manajemen NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988)

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta

© RUDYCT Academic Series

rudymt75@gmail.com

Bogor, Indonesia

5 December 2025

DINAMIKA EKONOMI GLOBAL: ANTARA PROTEKSIONISME DAN LIBERALISASI

Dinamika ekonomi global dewasa ini ditandai oleh tarik-menarik yang terus-menerus antara dua kekuatan besar: proteksionisme dan liberalisasi. Keduanya bukan sekadar istilah teknis dalam ekonomi internasional, tetapi mencerminkan perdebatan filosofis, politik, dan moral tentang bagaimana dunia seharusnya mengatur arus barang, jasa, modal, teknologi, dan bahkan data lintas batas negara.

Di satu sisi, liberalisasi perdagangan menjanjikan efisiensi, pertumbuhan, dan integrasi yang lebih dalam antarnegara. Di sisi lain, proteksionisme mengklaim diri sebagai "pelindung" industri domestik, lapangan kerja, dan kedaulatan ekonomi. Dinamika di antara keduanya menciptakan lanskap ekonomi global yang tidak pernah benar-benar stabil, melainkan selalu berada dalam proses negosiasi, kompromi, dan konflik.

Berikut ini penjelasan panjang dalam bentuk narasi akademik mengenai "Dinamika Ekonomi Global: Antara Proteksionisme dan Liberalisasi".

I. Pendahuluan: Dunia di Persimpangan Jalan

Sejak akhir Perang Dunia II, ekonomi global mengalami fase integrasi yang semakin dalam: dibentuknya sistem Bretton Woods, lahirnya GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), dan kemudian WTO (World Trade Organization) yang menjadi "konstitusi" informal bagi perdagangan internasional. Perjanjian-perjanjian perdagangan, baik

multilateral maupun regional, perlahan menurunkan tarif dan hambatan nontarif, sehingga barang dan jasa bisa bergerak lebih bebas.

Namun, abad ke-21 memperlihatkan kenyataan yang lebih rumit. Krisis keuangan global 2008, meningkatnya ketimpangan pendapatan di banyak negara, kebangkitan populisme, serta rivalitas geopolitik (misalnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok) mendorong munculnya gelombang baru proteksionisme. Laporan-laporan Bank Dunia dan WTO menunjukkan adanya lonjakan tindakan proteksionis sejak 2018, terutama dalam bentuk tarif dan berbagai pembatasan perdagangan lain. ([The World Bank Docs](#))

Di saat yang sama, agenda liberalisasi belum berhenti. Di kawasan Asia-Pasifik dan Asia Timur, misalnya, lahir mega-FTA seperti CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) dan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang secara bertahap menghapus sebagian besar tarif di antara negara anggotanya. ([United States Studies Centre](#))

Dengan demikian, kita tidak sedang menyaksikan “kematian globalisasi”, tetapi transformasinya menjadi bentuk yang lebih kompleks—sering disebut sebagai “re-globalization”, yakni upaya membangun integrasi global yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan. WTO dalam World Trade Report 2023 bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa tantangan abad ini (keamanan, ketimpangan, dan lingkungan) justru membutuhkan **lebih banyak** kerja sama perdagangan, bukan sebaliknya. ([World Trade Organization](#))

II. Konsep Dasar: Apa itu Proteksionisme dan Liberalisasi Perdagangan?

1. Proteksionisme

Secara sederhana, **proteksionisme** adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri. Ini dilakukan dengan cara membatasi masuknya barang dan jasa impor melalui tarif (bea masuk), kuota, subsidi ekspor domestik, aturan teknis, standar, dan berbagai hambatan nontarif lain. (www.slideshare.net)

Alasan di balik proteksionisme bisa sangat beragam:

- Melindungi industri yang baru tumbuh (infant industry).
- Menjaga lapangan kerja di sektor tertentu (misalnya industri baja, otomotif).
- Menjaga keamanan nasional (misalnya pembatasan impor teknologi penting, semikonduktor, peralatan telekomunikasi).
- Menjaga identitas budaya (pembatasan film, program TV, konten digital asing).
- Merespons tindakan tidak adil negara lain (anti-dumping, countervailing duties).

Proteksionisme sering digambarkan negatif dalam teks ekonomi karena dianggap mengurangi efisiensi dan kesejahteraan global. Namun dalam praktik politik, proteksionisme sering kali menjadi alat tawar, simbol kedaulatan, dan respons terhadap tekanan domestik.

2. Liberalisasi Perdagangan

Sebaliknya, **liberalisasi perdagangan** adalah proses pengurangan atau penghilangan hambatan perdagangan untuk memungkinkan arus barang dan jasa yang lebih bebas antarnegara. Ini meliputi pengurangan tarif, penghapusan kuota, penyederhanaan prosedur kepabeanan, dan penurunan hambatan regulasi. (Investopedia)

Liberalisasi biasanya:

- Dilakukan melalui perjanjian multilateral (di bawah WTO), regional (FTA, customs union), atau bilateral.
- Didasarkan pada teori **keunggulan komparatif** yang menyatakan bahwa negara akan lebih sejahtera bila berspesialisasi pada komoditas yang relatif lebih efisien untuk diproduksi, dan berdagang dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan produk lain.

Namun liberalisasi bukan tanpa kontroversi. Ia sering dikaitkan dengan:

- Penutupan industri yang tidak kompetitif.
- Relokasi pabrik ke negara biaya tenaga kerja murah.
- Tekanan terhadap buruh dan serikat pekerja.
- Kekhawatiran mengenai kedaulatan regulasi (misalnya regulasi lingkungan, kesehatan publik).

III. Landasan Teoretis: Dari Keunggulan Komparatif ke Perdagangan Strategis

1. Keunggulan Absolut dan Keunggulan Komparatif

Adam Smith menekankan bahwa perdagangan internasional menguntungkan jika setiap negara terlibat pada produksi barang di mana mereka memiliki **keunggulan absolut**—dapat memproduksi dengan biaya lebih rendah dalam arti fisik. Namun David Ricardo kemudian menunjukkan bahwa bahkan bila suatu negara lebih efisien dalam semua barang, perdagangan tetap menguntungkan bila masing-masing negara berspesialisasi pada barang yang memiliki **keunggulan komparatif**—relatif lebih efisien dibanding barang lain.

Contoh sederhana:

- Negara A lebih efisien memproduksi gandum *dan* tekstil dibanding negara B, tetapi keuntungan relatif lebih besar pada gandum.
- Negara B, meskipun kalah dalam efisiensi absolut, relatif lebih “kurang tidak efisien” dalam tekstil.

Dalam kondisi ini, liberalisasi dan perdagangan bebas memungkinkan:

- Negara A fokus pada gandum, negara B pada tekstil.
- Total produksi gabungan meningkat.
- Keduanya menikmati konsumsi di luar kemampuan produksi domestik masing-masing.

2. Heckscher–Ohlin dan Distribusi Faktor Produksi

Teori **Heckscher–Ohlin (H–O)** menambahkan bahwa pola perdagangan ditentukan oleh perbedaan kelimpahan faktor produksi. Negara yang kaya tenaga kerja (labor-abundant) cenderung mengekspor barang padat karya, sementara negara kaya modal (capital-abundant) mengekspor barang padat modal.

Implikasinya:

- Globalisasi cenderung menguntungkan faktor produksi yang melimpah, dan merugikan faktor yang langka.
- Di negara maju (kaya modal), buruh berpendidikan rendah dapat merasa terdesak oleh impor dari negara berkembang yang berbiaya tenaga kerja murah, sementara pemilik modal dan pekerja berkeahlian tinggi mendapat keuntungan.
- Di negara berkembang, tenaga kerja berpendidikan rendah bisa diuntungkan, sedangkan pemilik faktor lain mungkin menghadapi tekanan.

Ini adalah titik masuk penting bagi konflik politik: meskipun perdagangan meningkatkan “kue” ekonomi total, distribusi bagian kue tidak merata, sehingga muncul tekanan proteksionis.

3. New Trade Theory dan Perdagangan Intra-Industri

New Trade Theory menjelaskan bahwa perdagangan tidak hanya terjadi karena perbedaan faktor produksi, tetapi juga karena skala ekonomi dan diferensiasi produk. Negara dengan struktur mirip pun bisa berdagang secara intensif satu sama lain (perdagangan intra-industri), misalnya mobil Jerman vs mobil Jepang.

Liberalisasi dalam konteks ini:

- Meningkatkan skala pasar, sehingga perusahaan bisa memproduksi dalam skala besar.
- Mendorong inovasi dan diferensiasi produk.
- Menyediakan variasi produk yang lebih beragam bagi konsumen.

Namun, skala ekonomi dan konsentrasi industri ini juga membuat pemerintah tergoda memakai **strategic trade policy** untuk mendukung “juara nasional” (national champions) menghadapi pesaing global. Di sinilah proteksionisme “canggih” muncul: bukan sekadar tarif kasar, tetapi berbagai subsidi riset, kebijakan industri, dan pengaturan pasar.

IV. Argumen Pro dan Kontra: Mengapa Negara Meliberalisasi dan Mengapa Mereka Melindungi?

1. Argumen Pro-Liberalisasi

Beberapa argumen utama untuk liberalisasi perdagangan:

1. Efisiensi dan Pertumbuhan

Liberalisasi mengurangi distorsi harga, sehingga sumber daya

(tenaga kerja, modal, lahan) dapat mengalir ke sektor paling produktif. Banyak studi menunjukkan korelasi positif antara keterbukaan perdagangan dengan pertumbuhan PDB jangka panjang.

2. **Kesejahteraan Konsumen**

Konsumen menikmati harga lebih murah, kualitas lebih baik, dan variasi produk lebih banyak. Contoh nyata adalah produk elektronik, tekstil, dan barang konsumsi lainnya yang menjadi lebih terjangkau berkat impor dari negara biaya rendah.

3. **Transfer Teknologi dan Inovasi**

Integrasi global membuka akses terhadap teknologi, pengetahuan, dan praktik manajemen. Perusahaan domestik belajar dari pesaing asing dan meningkatkan kapasitas inovasi.

4. **Pengurangan Korupsi dan Rente**

Proteksi sering menciptakan rente bagi kelompok tertentu (kartel impor, perusahaan pelindung). Liberalisasi dapat mengurangi ruang bagi praktik rente melalui kompetisi yang lebih terbuka.

5. **Integrasi dalam Rantai Nilai Global (Global Value Chains - GVCs)**

Di era manufaktur terfragmentasi, komponen suatu barang diproduksi di banyak negara. Partisipasi dalam GVC mensyaratkan keterbukaan relatif terhadap perdagangan barang menengah, data, dan jasa terkait logistik, keuangan, dan teknologi.

2. **Argumen Pro-Proteksionisme**

Di sisi lain, ada argumen yang sering dipakai untuk membenarkan proteksionisme:

1. **Infant Industry**

Negara berkembang sering merasa bahwa industri manusianya

masih “bayi” yang belum siap bersaing dengan raksasa global. Proteksi sementara diperlukan agar mereka dapat belajar, meningkatkan skala, dan mencapai efisiensi. Tantangannya: “sementara” sering menjadi permanen karena tekanan politik.

2. **Kedaulatan Ekonomi dan Keamanan Nasional**

Krisis pandemi, perang, dan gangguan rantai pasok memperlihatkan betapa berbahayanya ketergantungan mutlak pada impor untuk sektor strategis (pangan, energi, farmasi, teknologi). Negara kemudian menerapkan bentuk proteksionisme “strategis” untuk memastikan kapasitas produksi domestik minimum.

3. **Stabilisasi Sosial dan Politik**

Penutupan pabrik akibat impor murah bisa memicu pengangguran massal dan instabilitas sosial. Pemerintah yang menghadapi tekanan politik domestik sering merespons dengan menaikkan tarif sebagai simbol “perlindungan rakyat”.

4. **Standard dan Nilai Lokal**

Kadang proteksionisme menyamar sebagai kebijakan standar lingkungan, kesehatan, atau sosial. Misalnya, pembatasan produk yang tidak memenuhi standar lingkungan tertentu. Ini bisa menjadi cara memaksakan standar global yang lebih tinggi, atau justru alat proteksionis terselubung.

5. **Balasan terhadap Praktik Tidak Adil**

Ketika negara lain memberi subsidi besar pada ekspor atau memanipulasi nilai tukar, pemerintah domestik dapat menjawab dengan tarif balasan (retaliatory tariffs) atau tindakan anti-dumping.

Dengan demikian, pertarungan antara proteksionisme dan liberalisasi bukan sekadar pertarungan “baik vs buruk”, melainkan negosiasi antara

berbagai tujuan: efisiensi vs pemerataan, keterbukaan vs kedaulatan, jangka pendek vs jangka panjang.

V. Dari Bretton Woods ke Perang Dagang: Evolusi Dinamika Global

1. Era Pascaperang hingga 1980-an: Konsensus Keterbukaan

Periode 1950–1980 sering dianggap sebagai “zaman keemasan” perdagangan multilateral. GATT menginisiasi putaran perundingan yang secara bertahap menurunkan tarif barang industri di negara maju. Perdagangan dunia tumbuh lebih cepat daripada output global, dan integrasi ekonomi meningkat.

Banyak negara berkembang pada masa itu masih menerapkan strategi substitusi impor, dengan proteksi tinggi. Namun mulai 1980-an dan 1990-an, muncul **Washington Consensus** yang mendorong liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan deregulasi sebagai resep pembangunan. Negara-negara Asia Timur (Korea Selatan, Taiwan, kemudian Tiongkok dan negara ASEAN) menunjukkan bahwa pembukaan ekonomi dan integrasi global dapat menjadi motor industrialisasi yang cepat—meski dilakukan dengan sentuhan kebijakan industri yang kuat.

2. Krisis Asia, Krisis Global, dan Kelelahan Globalisasi

Krisis finansial Asia 1997–1998, kemudian krisis global 2008, menimbulkan kekecewaan terhadap globalisasi finansial dan perdagangan. Banyak kelompok masyarakat merasa:

- Lapangan kerja di negara maju pindah ke negara biaya rendah.
- Ketimpangan pendapatan meningkat.
- Negara kehilangan ruang kebijakan untuk melindungi rakyat kecil.

Krisis 2008 khususnya menjadi titik balik: meski proteksionisme eksplisit masih relatif terkendali (karena adanya aturan WTO), berbagai hambatan nontarif, subsidi, dan instrumen lain mulai digunakan lebih agresif.

3. Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok

Sejak 2018, dunia menyaksikan eskalasi perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia: Amerika Serikat dan Tiongkok. Tarif saling dinaikkan pada ratusan miliar dolar nilai perdagangan, disertai tindakan pembatasan terhadap perusahaan teknologi (Huawei, TikTok, dsb.).

([OxJournal](#))

Dampaknya:

- Mengganggu rantai pasok global, terutama di sektor elektronik dan manufaktur canggih.
- Memicu ketidakpastian investasi.
- Mendorong negara lain menata ulang strategi perdagangan dan industrinya.

Perang dagang ini bukan hanya soal defisit neraca perdagangan, tetapi juga persaingan teknologi dan keamanan nasional. Bagi banyak analis, ini adalah simbol pergeseran dari “hiper-globalisasi” ke era de-globalisasi parsial: bukan menghentikan perdagangan, tetapi merombak struktur dan arah alirannya.

4. Gelombang Tarif Baru dan Tantangan Mutakhir

Laporan WTO tentang kebijakan dagang G20 tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa nilai perdagangan yang tercakup oleh tindakan tarif baru meningkat tajam dibanding periode sebelumnya. ([World Trade Organization](#))

Di saat yang sama, OECD dalam Outlook ekonomi Desember 2025 mencatat bahwa:

- Investasi besar-besaran dalam teknologi (khususnya AI) di Amerika Serikat dan beberapa negara lain memberikan dorongan pada pertumbuhan global.
- Namun, risiko dari tarif, ketegangan geopolitik, dan overvaluasi sektor teknologi tetap tinggi. ([Reuters](#))

Dengan kata lain, ekonomi global saat ini digerakkan oleh dua kekuatan yang bertentangan:

1. **Tarif dan fragmentasi geopolitik** yang menekan perdagangan.
2. **Ledakan teknologi (AI, digitalisasi, energi baru)** yang mendorong investasi dan membuka bentuk perdagangan baru (digital trade, jasa berbasis platform, dsb.).

VI. Di Sisi Lain: Liberalisasi Regional dan Mega-FTA

Meskipun wacana proteksionisme menguat, proyek-proyek liberalisasi besar tidak berhenti. Bahkan, banyak analis berpendapat bahwa ketika forum multilateral (WTO) mandek, liberalisasi justru bergerak melalui jalur regional dan plurilateral.

1. CPTPP: “Gold Standard” Liberalisation

CPTPP, yang mencakup negara-negara seperti Jepang, Kanada, Australia, Meksiko, dan beberapa negara ASEAN, sering disebut sebagai salah satu FTA dengan standar tinggi. Ia mengatur:

- Penghapusan hampir semua tarif dalam jangka panjang.
- Aturan ketat mengenai hak kekayaan intelektual, e-commerce, BUMN, dan standar ketenagakerjaan serta lingkungan. ([United States Studies Centre](#))

CPTPP melambangkan jenis liberalisasi yang bukan lagi sekadar menurunkan tarif, tetapi mengharmoniskan berbagai aspek regulasi ekonomi, sehingga benar-benar mendekatkan pasar negara-negara anggotanya.

2. RCEP: Konsolidasi Kawasan Asia Timur dan Pasifik

RCEP melibatkan ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru. Perjanjian ini:

- Menyatukan berbagai FTA ASEAN+1 ke dalam satu kerangka besar.
- Menurunkan atau menghapus tarif pada hampir 90% pos tarif dalam jangka panjang.
- Mengatur perdagangan barang, jasa, investasi, serta kerja sama ekonomi. (pecc.org)

Bagi kawasan Asia, RCEP berpotensi:

- Memperdalam integrasi rantai nilai regional.
- Menjadi penyeimbang terhadap tensi dagang global.
- Memberi sinyal bahwa liberalisasi belum mati, justru bergeser ke Asia.

3. AfCFTA dan Integrasi Kawasan Lain

Di Afrika, **African Continental Free Trade Area (AfCFTA)** dicanangkan untuk menciptakan pasar tunggal bagi barang dan jasa di seluruh benua. Di Eropa, Uni Eropa terus memperluas jaringan FTA dengan mitra di seluruh dunia.

Semua ini menunjukkan bahwa di tengah gelombang proteksionisme, ada arus balik berupa **regionalisme liberal** yang mencoba mempertahankan arsitektur ekonomi global yang relatif terbuka—meski dengan fragmentasi blok.

VII. Re-Globalization: Upaya Menata Ulang Globalisasi

World Trade Report 2023 dari WTO mengusulkan konsep **re-globalization**: bukan mundur dari globalisasi, tetapi merombaknya agar lebih:

- Inklusif (mengurangi ketimpangan dan memastikan negara berkembang ikut menikmati manfaat).
- Berkelanjutan (memperhatikan agenda lingkungan dan perubahan iklim).
- Aman (memperhitungkan risiko keamanan nasional dan resiliensi rantai pasok). ([World Trade Organization](#))

Dalam perspektif ini, dinamika proteksionisme vs liberalisasi tidak lagi dapat dibaca sebagai "perang" zero-sum. Sebaliknya, dunia sedang mencari **kombinasi baru** antara keterbukaan dan kehati-hatian:

- **De-risking**, bukan decoupling total: negara-negara berusaha mengurangi ketergantungan ekstrem pada satu pemasok atau satu negara (misalnya pada Tiongkok untuk komponen tertentu), tanpa benar-benar memutus hubungan.
- **Friend-shoring**: mengalihkan sebagian rantai pasok ke negara "sahabat" secara politik, untuk mengurangi risiko geopolitik.
- **Green trade**: kebijakan dagang yang memasukkan standar lingkungan, misalnya EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), yang pada satu sisi mempromosikan transisi hijau, namun di sisi lain dinilai sebagai bentuk proteksionisme baru berbasis iklim.

Re-globalisasi menuntut kebijakan yang lebih canggih: liberalisasi yang tidak naif, proteksionisme yang tidak semata populis, dan kerja sama

internasional yang mengakui kompleksitas hubungan antara perdagangan, keadilan sosial, dan keberlanjutan.

VIII. Dampak Dinamika Ini bagi Negara Berkembang dan Indonesia

Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, dinamika antara proteksionisme dan liberalisasi ini membuka ruang risiko sekaligus peluang.

1. Peluang

1. Akses Pasar dan GVC

Perjanjian seperti RCEP dan berbagai FTA memberi akses pasar yang lebih luas untuk ekspor manufaktur, produk agrikultur, dan jasa.

Partisipasi dalam rantai nilai global—misalnya di sektor elektronik, otomotif, tekstil, atau agribisnis—memungkinkan negara berkembang “meloncat” dari produksi bahan mentah ke produk bernilai tambah.

2. Transfer Teknologi dan Investasi Asing

Liberalisasi investasi dan perdagangan jasa (logistik, keuangan, digital) dapat menarik FDI yang membawa teknologi, keterampilan manajerial, dan akses jaringan global.

3. Diversifikasi Mitra Dagang

Di tengah rivalitas global, negara berkembang dapat memanfaatkan “ruang di tengah” untuk memperluas mitra: tidak hanya bergantung pada satu atau dua ekonomi besar, tetapi menggarap peluang di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

2. Risiko

1. **De-industrialization Premature**

Bila pasar dibuka terlalu cepat tanpa kebijakan industri yang kuat, industri manufaktur yang baru tumbuh bisa kalah bersaing dan mati, sehingga negara tetap terjebak pada ekspor komoditas primer.

2. **Ketergantungan Baru**

Integrasi dalam GVC berisiko menciptakan ketergantungan tinggi pada beberapa perusahaan multinasional dan beberapa negara tertentu untuk komponen penting. Gangguan geopolitik atau krisis di negara tersebut segera mengguncang perekonomian domestik.

3. **Tekanan terhadap UMKM dan Petani Kecil**

Produk impor murah dapat menekan produsen kecil yang tidak siap bersaing, menimbulkan masalah sosial di pedesaan dan sektor informal.

4. **Standar Tinggi dan Hambatan Terselubung**

Perjanjian modern sering mensyaratkan standar tinggi (lingkungan, hak buruh, data protection). Tanpa kapasitas regulasi dan institusi yang kuat, negara berkembang bisa kesulitan memenuhi, sehingga tidak mampu memanfaatkan peluang secara penuh.

3. Strategi “Jalan Tengah”: Keterbukaan yang Cerdas

Dalam konteks ini, strategi yang paling realistis bagi negara berkembang bukanlah proteksionisme total atau liberalisasi total, melainkan

keterbukaan yang cerdas (*smart openness*), misalnya:

- Mengadopsi proteksi selektif dan sementara untuk industri strategis, dengan exit strategy yang jelas.
- Mengaitkan liberalisasi dengan program penguatan kapasitas produksi domestik, pendidikan, dan infrastruktur.

- Menggunakan kebijakan perdagangan untuk mendorong agenda lingkungan (green industrial policy) dan transformasi digital.
- Mengoptimalkan peran perjanjian regional (RCEP, ASEAN, dsb.) sebagai batu loncatan, bukan tujuan akhir.

IX. Perdagangan, Teknologi, dan Masa Depan: Dari Barang Fisik ke Data dan AI

Dinamika proteksionisme dan liberalisasi hari ini semakin rumit karena objek yang diperdagangkan bukan lagi hanya barang fisik, tetapi juga:

- **Data lintas batas** (cross-border data flows)
- **Jasa digital** (cloud, platform, fintech)
- **Teknologi canggih** (AI, semikonduktor, telekomunikasi 5G/6G)
- **Infrastruktur keuangan global** (sistem pembiayaan perdagangan, mata uang cadangan, dsb.)

Laporan UNCTAD terbaru menekankan bahwa keterkaitan antara sistem keuangan global, perdagangan, dan teknologi semakin erat. Pergeseran di pasar keuangan—misalnya kondisi likuiditas dolar AS—dapat secara langsung memengaruhi perdagangan global, khususnya bagi negara berkembang yang bergantung pada pembiayaan perdagangan dan aliran modal asing. ([Reuters](#))

Sementara itu, belanja besar-besaran pada infrastruktur AI di negara maju (seperti Amerika Serikat) menciptakan permintaan global untuk chip, peralatan litografi, layanan cloud, dan perangkat keras terkait yang terhubung dalam rantai pasok internasional. OECD mencatat bahwa lonjakan investasi ini membantu menopang pertumbuhan global, meskipun di bawah bayang-bayang konflik tarif dan ketidakpastian. ([The Wall Street Journal](#))

Ini berarti:

- Proteksionisme klasik berbasis tarif barang fisik kini bercampur dengan pembatasan ekspor teknologi, kontrol data, dan sanksi keuangan.
- Liberalisasi juga bergerak ke ranah baru: perjanjian digital, standarisasi teknologi, dan interoperabilitas sistem pembayaran.

Masa depan perdagangan internasional tidak lagi hanya soal “free trade vs tariff”, tetapi tentang bagaimana dunia mengatur arus teknologi, data, dan modal dengan cara yang adil dan aman.

X. Dimensi Keadilan, Lingkungan, dan Inklusivitas

Perdebatan proteksionisme vs liberalisasi tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan moral: **siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan?**

1. Keadilan Sosial dan Ketimpangan

Globalisasi perdagangan sering dikritik karena dianggap memperbesar ketimpangan, terutama:

- Antara negara maju dan negara berkembang.
- Antara kelompok kaya dan miskin di dalam negara.

Namun, laporan World Trade Report 2024 juga menunjukkan bahwa perdagangan yang dirancang dengan kebijakan pendukung (redistribusi, jaring pengaman sosial, kebijakan pendidikan) dapat menjadi alat inklusi, bukan eksklusif. ([World Economic Forum](#))

Artinya, persoalan bukan hanya pada “terbuka atau tertutup”, tetapi bagaimana kebijakan domestik mengelola dampak distribusional dari keterbukaan.

2. Lingkungan dan Perubahan Iklim

Perdagangan global selama beberapa dekade berkontribusi pada peningkatan emisi karbon melalui ekspansi produksi dan transportasi. Namun ia juga dapat menjadi kanal penyebaran teknologi hijau (green technology), standar lingkungan, dan investasi pada energi terbarukan.

Pertanyaan besar ke depan:

- Apakah kebijakan berbasis iklim seperti CBAM akan menjadi alat transformasi hijau global, atau sekadar proteksionisme terselubung yang membebani negara berkembang?
- Bagaimana negara berkembang dapat memanfaatkan liberalisasi untuk mengekspor produk hijau (misalnya energi terbarukan, produk agrikultur berkelanjutan) dan tidak sekadar menjadi penerima dampak negatif?

3. Inklusivitas Regional dan Peran Lembaga Internasional

Lembaga seperti WTO, IMF, Bank Dunia, dan UNCTAD masih menjadi arena penting untuk merundingkan aturan main. Tetapi mereka menghadapi:

- Tekanan dari negara besar yang cenderung menggunakan kekuatan unilaterally.
- Kritik bahwa mereka kurang mewakili suara negara berkembang secara memadai.

Konsep re-globalisasi mengandaikan reformasi lembaga-lembaga ini agar:

- Proses pengambilan keputusan lebih inklusif.
- Mekanisme penyelesaian sengketa lebih efektif dan dihormati.

- Agenda perdagangan terhubung dengan sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs).
-

XI. Sintesis: Dinamika yang Tak Pernah Selesai

Jika dilihat secara historis, dinamika ekonomi global selalu bergerak dalam siklus:

- Fase keterbukaan tinggi → munculkan efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga ketimpangan dan ketidakpuasan.
- Ketidakpuasan ini memicu tekanan politik → mendorong proteksionisme.
- Jika proteksionisme berlebihan, stagnasi dan konflik dapat terjadi → menimbulkan dorongan baru untuk keterbukaan dan kerja sama.

Saat ini, dunia berada dalam fase **transisi**: globalisasi lama yang sangat bertumpu pada liberalisasi finansial dan perdagangan barang massal sedang dikoreksi. Di sisi lain, bentuk baru integrasi—berbasis teknologi, data, dan agenda keberlanjutan—sedang tumbuh.

XII. Penutup: Menuju Arsitektur Ekonomi Global yang Lebih Seimbang

Dinamika antara proteksionisme dan liberalisasi mencerminkan dilema mendasar dalam ekonomi politik global. Tidak ada jawaban sederhana, tetapi beberapa prinsip dapat diajukan sebagai arah ke depan:

1. Keterbukaan yang Berkeadilan

Liberalisasi tetap penting untuk efisiensi dan inovasi, tetapi harus diimbangi dengan kebijakan domestik yang kuat dalam

pendidikan, redistribusi, dan perlindungan sosial. Tanpa itu, tekanan politik untuk proteksionisme akan selalu muncul.

2. **Proteksi yang Selektif dan Transparan**

Proteksionisme tidak boleh menjadi selimut untuk melindungi kepentingan sempit dan rente. Proteksi harus:

- Jelas tujuannya (infant industry, keamanan nasional, transisi hijau).
- Jelas batas waktunya.
- Transparan, agar dapat dipantau dan dievaluasi.

3. **Reformasi Tata Kelola Global**

Lembaga-lembaga internasional perlu direformasi agar mampu mengelola tantangan baru: de-risking, green trade, digital trade, dan ketimpangan global. Tanpa itu, dunia akan terpecah dalam blok-blok proteksionis yang saling mencurigai.

4. **Peran Negara Berkembang sebagai Agen, Bukan Objek**

Negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak boleh hanya menjadi "korban" tarik-menarik antara blok besar. Mereka perlu merumuskan strategi nasional dan regional:

- Mengoptimalkan peran di RCEP, ASEAN, dan perjanjian lainnya.
- Mengembangkan kebijakan industri hijau dan digital.
- Membangun kapasitas negosiasi agar dapat mempengaruhi, bukan sekadar mengikuti, aturan main global.

5. **Menyelaraskan Perdagangan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan**

Perdagangan tidak boleh dipandang hanya sebagai alat mengejar pertumbuhan PDB, tetapi sebagai instrumen untuk:

- Mengurangi kemiskinan,
- Memperluas kesempatan kerja layak,
- Mendorong transisi hijau,
- Dan memperkuat ketahanan sosial.

Pada akhirnya, dinamika ekonomi global “antara proteksionisme dan liberalisasi” adalah cerita tentang bagaimana komunitas internasional belajar menyeimbangkan **keterbukaan dan perlindungan, efisiensi dan keadilan, kedaulatan nasional dan kerja sama global**.

Cerita ini belum selesai—ia terus ditulis oleh kebijakan dagang, pilihan politik, inovasi teknologi, dan suara masyarakat di seluruh dunia.

-
- [Reuters](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
 - [Reuters](#)

Kita lanjutkan empat “pena” yang sedang menulis cerita dinamika ekonomi global: **kebijakan dagang, pilihan politik, inovasi teknologi, dan suara masyarakat**.

Disusun seperti bab lanjutan dari artikel:

1. Kebijakan Dagang: Antara Instrumen Teknis dan Sinyal Politik

Kebijakan dagang bukan sekadar tarif, kuota, atau perjanjian FTA. Ia adalah **bahasa resmi** yang dipakai negara untuk menyampaikan sikapnya terhadap dunia: seberapa terbuka, seberapa curiga, dan seberapa percaya diri.

1.1. Dari Tarif ke “Regulasi Generasi Baru”

Pada fase awal globalisasi, perdebatan berkisar pada **tarif**: berapa persen bea masuk untuk baja, tekstil, mobil, dan seterusnya. Kini, struktur kebijakan dagang jauh lebih kompleks:

- **Hambatan nontarif**: standar teknis, sertifikasi keamanan, aturan label, sanitary & phytosanitary measures (SPS), dsb.
- **Kebijakan digital dan data**: aturan perpindahan data lintas batas, kewajiban lokalisasi server, perlindungan privasi.
- **Kebijakan iklim**: mekanisme pajak karbon di perbatasan (CBAM), standar emisi untuk produk impor.
- **Aturan BUMN dan subsidi**: transparansi dan pembatasan bantuan negara, terutama di industri strategis.

Instrumen-instrumen ini sering dikemas dengan narasi mulia—perlindungan konsumen, lingkungan, keamanan siber—namun sekaligus dapat menjadi **proteksionisme terselubung**. Di sinilah tarik-menarik antara proteksi dan liberalisasi memasuki ranah “abu-abu” yang sulit dinilai hanya dengan angka tarif.

1.2. Fragmentasi Aturan: WTO vs Mega-FTA

Secara ideal, WTO diharapkan menjadi “konstitusi” global yang menyatukan aturan permainan. Namun kebuntuan perundingan Doha, serta ketegangan antara kekuatan besar, membuat banyak negara mengalihkan energi pada:

- **FTA bilateral** (misalnya Jepang–Uni Eropa).
- **Perjanjian regional / mega-FTA** seperti RCEP, CPTPP, AfCFTA.

Akibatnya, arsitektur kebijakan dagang global menyerupai “**mangkuk spageti**”: tumpang tindih perjanjian, aturan asal barang yang berbeda-beda, dan standar yang tidak selalu kompatibel.

Dampaknya:

- Perusahaan besar dengan sumber daya legal dan teknis mampu memanfaatkan kompleksitas ini.
- UMKM dan negara kecil sering kesulitan mengejar, sehingga potensi manfaat liberalisasi tidak sepenuhnya dirasakan.

Kebijakan dagang yang ideal bukan hanya *lebih bebas*, tetapi juga **lebih sederhana, transparan, dan dapat diakses** oleh pelaku ekonomi yang kecil dan menengah.

1.3. Dari “Free Trade” ke “Fair Trade”

Tekanan sosial dan politik mendorong perubahan paradigma: dari sekadar “**free trade**” (perdagangan bebas) ke “**fair trade**” (perdagangan yang adil).

Ini tercermin dalam:

- Klausul hak pekerja dan standar lingkungan dalam perjanjian dagang.
- Mekanisme penyelesaian sengketa yang memberi ruang bagi isu lingkungan dan HAM.
- Skema sertifikasi seperti perdagangan kopi, kakao, atau produk pertanian berkelanjutan.

Dalam konteks ini, kebijakan dagang digunakan bukan hanya untuk mengejar efisiensi, tetapi juga sebagai **instrumen nilai**: mendorong standar perlindungan sosial dan ekologis di seluruh rantai pasok.

2. Pilihan Politik: Politik Dalam Negeri yang “Membocorkan” Globalisasi

Di balik setiap angka tarif dan setiap pasal perjanjian dagang, selalu ada **koalisi politik**. Kebijakan dagang lahir dari kompromi dan pertarungan antar kelompok kepentingan: pengusaha besar, buruh, petani, konsumen, birokrasi, dan kelompok masyarakat sipil.

2.1. Populisme dan Politik Anti-Globalisasi

Dalam banyak negara, globalisasi dianggap:

- Menguntungkan elite finansial dan korporasi global.
- Mengorbankan pekerja pabrik di kota kecil, petani kecil, dan kelompok rentan lainnya.

Narasi ini memberi amunisi bagi **gerakan populis** yang menentang perjanjian perdagangan, mempromosikan slogan “ambil kembali kendali” (take back control), dan menjanjikan perlindungan cepat melalui tarif dan pembatasan impor.

Akibatnya:

- Kebijakan dagang menjadi **simbol identitas politik**: apakah seorang pemimpin pro-“rakyat biasa” atau pro-“elite globalis”.
- Rasionalitas ekonomi sering kalah oleh **retorika politik**; tarif dipakai untuk memperoleh simpati pemilih, meski secara ekonomi justru menaikkan harga bagi konsumen domestik.

2.2. Rivalitas Geopolitik: Perdagangan sebagai Senjata

Pilihan politik tingkat global juga mengubah wajah kebijakan dagang:

- **Perang dagang** dan sanksi ekonomi digunakan sebagai instrumen tekanan geopolitik.
- Pembatasan ekspor semikonduktor, teknologi militer-sipil ganda, atau perangkat telekomunikasi tertentu dipresentasikan sebagai isu keamanan nasional.

Perdagangan yang tadinya berperan sebagai **jembatan** antarnegara, kini juga dapat berubah menjadi **senjata** dalam konflik strategis. Fragmentasi ekonomi global sulit dipisahkan dari polarisasi politik dan keamanan.

2.3. Politik Domestik Negara Berkembang: Dilema antara Proteksi dan Reformasi

Di negara berkembang, pilihan politik punya dilema khas:

- Proteksi tinggi bisa melindungi kelompok industri yang berpengaruh secara politik, tetapi menghambat efisiensi dan merugikan konsumen.
- Liberalisasi yang cepat bisa memicu kerusuhan sosial bila tidak diiringi kebijakan kompensasi dan peningkatan kapasitas.

Seringkali, reformasi dagang yang rasional secara ekonomi gagal bukan karena teori yang salah, tetapi karena **tidak diiringi strategi politik**: komunikasi publik, fase transisi, serta perlindungan sementara bagi kelompok yang paling terdampak.

3. Inovasi Teknologi: Mesin Baru yang Mengubah Peta Perdagangan

Jika proteksionisme dan liberalisasi adalah “angin” politik dan kebijakan, maka **inovasi teknologi** adalah “ arus laut” yang pelan tapi pasti mengubah rute kapal dagang dunia.

3.1. Digitalisasi Perdagangan dan Ekonomi Platform

Teknologi digital mengubah:

1. **Cara barang diperdagangkan**

E-commerce lintas negara, platform B2B, dan layanan logistik digital memungkinkan UMKM masuk ke pasar global tanpa harus memiliki jaringan fisik besar.

2. **Jenis barang dan jasa yang diperdagangkan**

Bukan hanya barang fisik, tetapi juga:

- software as a service (SaaS),
- layanan komputasi awan (cloud),
- jasa kreatif dan digital (desain, musik, film, game),
- kursus dan layanan pendidikan daring lintas negara.

3. **Biaya transaksi**

Digitalisasi menurunkan biaya pencarian informasi, negosiasi, dan pemantauan kontrak. Efeknya mirip dengan penurunan tarif: perdagangan menjadi **lebih mudah dan murah**.

Namun di sisi lain, muncul kebijakan baru:

- Aturan perpajakan ekonomi digital,
- Batasan data lintas batas (data localization),
- Regulasi platform besar (antitrust, konten, privasi).

Teknologi mendorong liberalisasi "natural" (karena menurunkan biaya), tetapi sekaligus mengundang bentuk proteksionisme baru di ruang digital.

3.2. Otomatisasi, AI, dan Relokasi Produksi

Kemajuan robotika dan kecerdasan buatan mengubah kalkulasi klasik tentang lokasi produksi:

- Dulu, perusahaan memindahkan pabrik ke negara upah rendah demi menekan biaya.
- Dengan otomatisasi, **selisih upah** menjadi kurang menentukan; yang lebih penting adalah akses ke teknologi, pasar, dan stabilitas regulasi.

Akibatnya:

- Sebagian kegiatan manufaktur dapat “dipulangkan” (reshoring) atau dipindahkan ke negara yang secara politik dianggap lebih aman (friend-shoring).
- Ini memperkuat tren fragmentasi, tetapi bukan semata karena tarif—melainkan karena interaksi antara **teknologi dan politik**.

AI juga mengubah perdagangan jasa:

- Layanan keuangan, konsultasi, desain, bahkan sebagian kesehatan dan pendidikan, bisa melintasi batas negara dalam bentuk digital.
- Perdebatan proteksi vs liberalisasi bergeser dari “barang di pelabuhan” ke **algoritma di server**.

3.3. Teknologi Hijau dan Perdagangan Berbasis Iklim

Transisi menuju ekonomi rendah karbon menciptakan:

- **Pasar baru:** panel surya, baterai, kendaraan listrik, teknologi penyimpanan energi, dan jasa pengelolaan karbon.
- **Perdebatan baru:** siapa yang memimpin industri hijau, dan bagaimana standar lingkungan digunakan dalam perdagangan.

Negara yang unggul dalam teknologi hijau berupaya:

- Membuka pasar global melalui liberalisasi tarif bagi produk hijau,
- namun sekaligus melindungi industrinya melalui subsidi, standardisasi teknis, dan kebijakan pengadaan publik.

Di sisi lain, negara yang masih bergantung pada ekspor komoditas fosil menghadapi tekanan untuk **diversifikasi**, jika tidak ingin tertinggal dalam arsitektur ekonomi baru.

4. Suara Masyarakat: Dari Jalanan ke Ruang Digital

Dulu, kebijakan dagang sering dipandang sebagai urusan teknokrat di balik pintu tertutup. Kini, ia menjadi isu publik yang hangat, dibicarakan bukan hanya di parlemen tetapi juga di:

- media sosial,
- komunitas lokal,
- jaringan LSM,
- kampus dan forum warga.

4.1. Gerakan Sosial dan Advokasi Transnasional

Kelompok masyarakat sipil lintas negara telah lama menyuarakan kritik terhadap globalisasi yang buta terhadap:

- ketimpangan sosial,
- eksploitasi buruh,
- kerusakan lingkungan.

Dalam setiap perundingan dagang besar, hampir selalu ada:

- kampanye digital,
- petisi,

- aksi demonstrasi damai,
- forum alternatif (people's summit).

Mereka menuntut agar perjanjian dagang:

- transparan dalam proses perundingan,
- memberikan ruang partisipasi publik,
- mengandung klausul perlindungan sosial dan lingkungan yang nyata, bukan sekadar simbolik.

Suara masyarakat ini memaksa pemerintah dan lembaga internasional **merevisi cara berkomunikasi**: publikasi dokumen, konsultasi pemangku kepentingan, hingga penyusunan analisis dampak sosial–lingkungan.

4.2. Konsumen sebagai Pelaku Politik Ekonomi

Di era media sosial, konsumen bisa:

- memboikot produk dari perusahaan atau negara tertentu,
- memilih produk dengan label fair trade atau eco-label,
- menyebarkan informasi (benar maupun keliru) tentang praktik perusahaan dalam hitungan jam.

Konsumen tidak lagi sekadar *price taker*; mereka menjadi **aktor politik ekonomi**:

- ketika memilih kopi bersertifikat fair trade, ia mendorong standar tertentu dalam perdagangan global;
- ketika memboikot produk karena isu HAM atau lingkungan, ia mengirim sinyal ke perusahaan dan pemerintah.

Pilihan konsumsi mikro ini, jika terakumulasi dan diperkuat oleh kampanye digital, dapat memengaruhi struktur perdagangan dan strategi korporasi.

4.3. Generasi Muda dan Narasi Baru Globalisasi

Generasi muda—khususnya generasi Y, Z, dan Alpha—tumbuh dalam dunia:

- yang “secara default” terkoneksi digital,
- yang menyaksikan krisis finansial, pandemi, dan krisis iklim,
- dan yang merasakan langsung dampak ketidakpastian kerja akibat otomatisasi.

Mereka cenderung:

- lebih kritis terhadap janji globalisasi yang hanya berbicara pertumbuhan,
- lebih peka terhadap isu keberlanjutan dan keadilan,
- dan lebih terbiasa menggunakan teknologi sebagai alat mobilisasi.

Suara mereka muncul dalam:

- gerakan iklim (climate strikes),
- kampanye digital untuk regulasi platform dan perlindungan data,
- inisiatif kewirausahaan sosial yang menghubungkan pasar global dengan misi sosial-lingkungan.

Dalam jangka panjang, generasi inilah yang akan duduk di kursi pembuat kebijakan dan pemimpin bisnis—membawa **narasi baru**: globalisasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga bermoral dan berkelanjutan.

5. Menjahit Empat Benang: Menuju Arsitektur Baru Ekonomi Global

Jika kita satukan keempat elemen ini, tampak bahwa masa depan dinamika ekonomi global tidak akan ditentukan oleh satu aktor saja:

1. **Kebijakan dagang** menyediakan struktur formal: tarif, aturan, perjanjian.
2. **Pilihan politik** memberi arah dan momentum: apakah arus menuju keterbukaan atau penarikan diri.
3. **Inovasi teknologi** mengubah landscape: apa yang diperdagangkan, di mana diproduksi, dan bagaimana nilai diciptakan.
4. **Suara masyarakat** menjadi kompas moral dan sosial: mengingatkan bahwa angka PDB dan neraca perdagangan tidak boleh mengabaikan manusia dan bumi.

Dinamika **antara proteksionisme dan liberalisasi** pada akhirnya adalah dinamika:

- antara rasa takut dan harapan,
- antara kepentingan jangka pendek dan visi jangka panjang,
- antara logika pasar dan tuntutan keadilan.

Selama kebijakan dagang disusun dengan mempertimbangkan lanskap teknologi yang berubah, dilakukan melalui proses politik yang demokratis, dan mau mendengar suara masyarakat, maka globalisasi dapat diarahkan bukan sekadar menjadi **proyek efisiensi**, tetapi **proyek peradaban**—yang mengusahakan agar kemakmuran lintas batas benar-benar berpihak pada manusia dan alam, bukan hanya pada angka-angka statistik.

Berikut **glosarium** dan **daftar referensi** yang bisa dipakai untuk melengkapi tulisan "*Dinamika Ekonomi Global: Antara Proteksionisme dan Liberalisasi*".

A. Glosarium

1. Globalisasi ekonomi

Proses meningkatnya keterhubungan dan ketergantungan antarnegara melalui arus barang, jasa, modal, teknologi, data, dan tenaga kerja. Globalisasi membuat perekonomian nasional semakin terbuka terhadap pengaruh eksternal, baik peluang maupun risiko.

2. Proteksionisme

Kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi industri domestik dari persaingan asing melalui tarif, kuota, subsidi, dan berbagai hambatan nontarif. Proteksionisme sering dibenarkan dengan alasan menjaga lapangan kerja, keamanan nasional, dan stabilitas sosial. ([Digital Library](#))

3. Liberalisasi perdagangan (trade liberalization)

Proses pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan lintas negara, baik tarif maupun nontarif, agar arus barang dan jasa menjadi lebih bebas. Biasanya dilakukan melalui perjanjian dagang multilateral (WTO), regional (FTA), atau bilateral. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

4. Tarif (tariff)

Pajak yang dikenakan atas barang impor (kadang juga ekspor). Tarif

menaikkan harga barang impor di pasar domestik, sehingga memberi keuntungan relatif bagi produsen lokal. Instrumen proteksi paling klasik dan mudah diukur.

5. Hambatan nontarif (non-tariff barriers, NTB)

Berbagai bentuk pembatasan perdagangan selain tarif: kuota, lisensi impor, standar teknis, persyaratan sertifikasi, aturan keamanan produk, konten lokal, dan sebagainya. Hambatan nontarif sering lebih “halus” namun dampaknya bisa sama besar dengan tarif.

6. Kuota impor (import quota)

Batas maksimum jumlah fisik atau nilai impor untuk suatu komoditas dalam periode tertentu. Kuota membatasi volume perdagangan secara langsung, dan sering menciptakan rente bagi pemegang lisensi impor.

7. Dumping dan bea antidumping

- *Dumping*: praktik menjual produk di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah dibanding harga di pasar domestik atau di bawah biaya produksi.
- *Bea antidumping*: tarif tambahan yang dikenakan untuk mengimbangi praktik dumping yang dianggap merugikan industri lokal.

8. Infant industry argument

Alasan proteksionisme yang menyatakan bahwa industri “bayi” (baru tumbuh) perlu dilindungi sementara dari persaingan internasional sampai mencapai skala dan efisiensi yang memadai. Tantangannya: proteksi sering menjadi permanen karena tekanan politik.

9. Keunggulan absolut (absolute advantage)

Konsep Adam Smith: suatu negara memiliki keunggulan absolut bila dapat memproduksi suatu barang dengan biaya (atau input) yang lebih

rendah dibanding negara lain. Negara akan berdagang berdasarkan keunggulan absolut untuk meningkatkan efisiensi global.

10. Keunggulan komparatif (comparative advantage)

Konsep David Ricardo: suatu negara diuntungkan bila berspesialisasi pada barang yang dapat diproduksi dengan *biaya peluang* lebih rendah dibanding barang lain, bahkan bila negara tersebut kurang efisien secara absolut dalam semua barang. Ini adalah fondasi teoritis utama bagi perdagangan bebas.

11. Model Heckscher–Ohlin (H–O)

Teori perdagangan yang menekankan peran kelimpahan faktor produksi (modal, tenaga kerja, lahan). Negara kaya tenaga kerja akan mengekspor barang padat karya, sementara negara kaya modal mengekspor barang padat modal. Teori ini menjelaskan hubungan antara perdagangan dan distribusi pendapatan antar faktor produksi.

12. New Trade Theory

Gelombang teori perdagangan sejak 1980-an yang menekankan peran skala ekonomi (economies of scale), diferensiasi produk, dan persaingan tidak sempurna. Menjelaskan mengapa negara dengan struktur ekonomi mirip tetap dapat berdagang secara intensif (perdagangan intra-industri), misalnya pertukaran antar mobil Jepang dan mobil Jerman.

13. Perdagangan intra-industri (intra-industry trade)

Perdagangan dua arah dalam kategori produk yang sama, misalnya negara A mengekspor dan mengimpor jenis barang otomotif sekaligus. Muncul karena diferensiasi merek, kualitas, spesialisasi komponen, dan preferensi konsumen terhadap variasi.

14. Global Value Chains (GVCs) / Rantai Nilai Global

Fragmentasi proses produksi ke berbagai negara; setiap negara mengerjakan satu atau beberapa tahap (desain, komponen, perakitan, logistik). Nilai tambah tersebar di banyak yurisdiksi, sehingga

perdagangan yang terjadi banyak berbentuk ekspor–impor barang antara dan jasa terkait. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

15. World Trade Organization (WTO)

Organisasi internasional yang mengatur aturan main sistem perdagangan multilateral. WTO mengelola perjanjian-perjanjian perdagangan, memfasilitasi perundingan, memonitor kebijakan dagang, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antaranggota. WTO juga menerbitkan *World Trade Report* tahunan yang menganalisis dinamika perdagangan global. ([World Trade Organization](#))

16. Free Trade Agreement (FTA)

Perjanjian perdagangan bebas antara dua atau lebih negara untuk menurunkan atau menghapus tarif dan berbagai hambatan lain bagi sebagian besar perdagangan barang (dan sering juga jasa) di antara mereka. Contoh: FTA bilateral, ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan berbagai perjanjian regional lain.

17. Regionalisme ekonomi

Kecenderungan negara-negara dalam satu kawasan untuk membentuk blok perdagangan atau integrasi ekonomi regional, misalnya Uni Eropa, NAFTA/USMCA, ASEAN, RCEP, AfCFTA. Regionalisme dapat bersifat komplementer atau substitutif terhadap sistem multilateral.

18. Mega-FTA

Perjanjian perdagangan bebas berskala besar yang melibatkan banyak negara dan mencakup porsi besar PDB serta perdagangan dunia. Biasanya memuat aturan “generasi baru” di luar tarif, seperti e-commerce, hak kekayaan intelektual, standar lingkungan, dan BUMN.

19. CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)

Mega-FTA yang melibatkan 11 negara di kawasan Pasifik (Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru,

Singapura, Vietnam). CPTPP menurunkan tarif secara signifikan dan mengatur berbagai isu lintas batas seperti investasi, jasa, e-commerce, dan BUMN. ([GOV.UK](https://gov.uk))

20. RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)

Perjanjian perdagangan regional yang mencakup ASEAN dan mitranya (Tiongkok, Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru). RCEP menyederhanakan aturan asal barang dan menurunkan tarif secara bertahap untuk sebagian besar komoditas, sehingga memperdalam integrasi rantai nilai di Asia. ([World Trade Organization](https://wto.org))

21. Re-globalisasi (re-globalization)

Istilah yang digunakan WTO untuk menggambarkan fase baru globalisasi yang bertujuan **memperluas** integrasi perdagangan sambil memperhatikan tiga pilar: keamanan, inklusivitas (pengurangan ketimpangan), dan keberlanjutan lingkungan. Re-globalisasi bukan mundur dari perdagangan, melainkan menata ulang pola dan aturannya agar lebih aman dan adil. ([World Trade Organization](https://wto.org))

22. De-globalisasi

Proses pembalikan sebagian dari globalisasi, misalnya melalui peningkatan tarif, relokasi produksi ke dalam negeri, atau fragmentasi blok perdagangan. Dalam praktik, yang lebih banyak terjadi saat ini adalah fragmentasi parsial dan penataan ulang (re-globalisasi), bukan penghentian total perdagangan.

23. De-risking

Strategi mengurangi risiko ekonomi dan geopolitik dengan cara mendiversifikasi mitra dagang dan pemasok, mengurangi ketergantungan ekstrem pada satu negara atau satu pemasok, tanpa memutus hubungan dagang secara total. Konsep ini sering dipakai dalam konteks hubungan dagang dengan Tiongkok, khususnya untuk komponen kritis.

24. Friend-shoring

Kebijakan mengalihkan investasi dan rantai pasok ke negara-negara yang dianggap “bersahabat” secara politik dan berbagi nilai atau kepentingan strategis. Tujuannya meningkatkan keamanan pasokan, khususnya untuk barang strategis (semikonduktor, energi, bahan baku penting).

25. CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)

Mekanisme penyesuaian karbon di perbatasan yang diperkenalkan Uni Eropa. Impor dari negara yang standar iklimnya dianggap lebih rendah akan dikenai biaya tambahan berdasarkan kandungan emisi karbonnya. Di satu sisi mendorong transisi hijau global, di sisi lain dikritik sebagai bentuk proteksionisme berbasis iklim.

26. Green trade / perdagangan hijau

Perdagangan internasional yang mendukung tujuan lingkungan: ekspor–impor teknologi bersih, energi terbarukan, produk berlabel ramah lingkungan, serta aturan dagang yang mendorong dekarbonisasi dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

27. Perdagangan inklusif (inclusive trade)

Pendekatan kebijakan yang berupaya memastikan manfaat perdagangan tersebar lebih merata, baik antarnegara maupun di dalam negara. Misalnya melalui program kompensasi, pelatihan tenaga kerja, fasilitasi UMKM, dan kebijakan yang mengurangi hambatan partisipasi negara berkembang dalam perdagangan global. ([World Trade Organization](#))

28. Ketimpangan (inequality) dalam konteks perdagangan

Perbedaan kesejahteraan ekonomi antarnegara dan antarkelompok di dalam negara yang bisa diperparah atau justru dikurangi oleh perdagangan. Banyak studi WTO dan UNCTAD menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan menurunkan ketimpangan antarnegara, tetapi

tanpa kebijakan pendukung dapat memperbesar ketimpangan di dalam negara. ([World Trade Organization](#))

29. Trade–finance linkages

Keterkaitan antara perdagangan dan sistem keuangan global. Lebih dari 90% perdagangan dunia kini bergantung pada pembiayaan perdagangan (trade finance), sehingga gejolak keuangan dapat dengan cepat mengganggu arus barang dan jasa, terutama di negara berkembang. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

30. OECD Economic Outlook

Publikasi berkala OECD yang menganalisis prospek ekonomi global dan negara-negara anggota/non-anggota, termasuk dampak tarif, investasi AI, dan ketegangan perdagangan terhadap pertumbuhan dan perdagangan dunia. ([OECD](#))

B. Referensi

1. Buku teks & monograf kunci

1. **Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J.** (2018). *International Economics: Theory and Policy* (11th Global Edition). Pearson. ([Pearson](#))
2. **Baldwin, R.** (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press. ([JSTOR](#))
3. **Rodrik, D.** (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. W. W. Norton. ([drodrik.scholars.harvard.edu](#))
4. **Stiglitz, J. E.** (2017). *Globalization and Its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump*. W. W. Norton. ([Amazon](#))

5. **Krugman, P. (Ed.).** (1986). *Strategic Trade Policy and the New International Economics*. MIT Press. ([Google Books](#))
6. **Helpman, E.** (2025). *The Future of Foreign Trade* (Working Paper). Harvard University / NBER. ([Harvard Scholars Helpman](#))

Buku-buku ini dapat menjadi rujukan teoritis utama untuk bagian yang menjelaskan keunggulan komparatif, model H–O, new trade theory, dan perdebatan kebijakan perdagangan (strategic trade policy).

2. Laporan lembaga internasional & organisasi multilateral

7. **World Trade Organization (WTO).** (2023). *World Trade Report 2023: Re-globalization for a Secure, Inclusive and Sustainable Future*. WTO. ([World Trade Organization](#))
8. **World Trade Organization (WTO).** (2024). *World Trade Report 2024: Trade and Inclusiveness*. WTO. ([World Trade Organization](#))
9. **UNCTAD.** (2024). *Trade and Development Report 2024*. United Nations Conference on Trade and Development. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))
10. **UNCTAD.** (2025). *Trade and Development Report 2025: On the Brink – Trade, Finance and the Reshaping of the Global Economy* (Advance copy). UNCTAD. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))
11. **OECD.** (2025). *OECD Economic Outlook, Volume 2025 Issue 2: Resilient Growth but with Increasing Fragilities*. OECD Publishing, Paris. ([OECD](#))

Laporan-laporan ini relevan untuk:

- data tren perdagangan global,
- isu re-globalisasi,

- kaitan perdagangan–ketimpangan,
- risiko fragmentasi dan tarif baru,
- serta peran investasi teknologi (termasuk AI) dalam menopang pertumbuhan.

3. Dokumen perjanjian & sumber resmi kebijakan dagang

12. **Government of New Zealand / MFAT.** *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP): Text and Resources.* ([MFAT](#))
13. **Government of the United Kingdom.** (2023). *CPTPP: Full Agreement Text.* ([GOV.UK](#))
14. **Government of Australia / DFAT.** *CPTPP – Official Documents.* ([DFAT](#))
15. **Government of Canada / Global Affairs Canada.** (2025). *CPTPP Overview and Resources.* ([Global Affairs Canada](#))

Dokumen-dokumen ini dapat menjadi rujukan ketika Bapak membahas mega-FTA dan liberalisasi “generasi baru” (e-commerce, BUMN, standar tenaga kerja dan lingkungan).

4. Artikel kebijakan & ringkasan populer yang berguna

16. **WTO & WTO Chairs / berbagai penulis.** Ringkasan dan diskusi tentang *World Trade Report 2023* dan *re-globalization*. ([wtochairs.org](#))

17. **World Economic Forum.** (2024). "Five findings from the WTO's World Trade Report 2024 on trade and inclusivity." ([World Economic Forum](#))
18. **UNCTAD.** (2025). "Finance can put trade at risk, leaving the global economy 'on the brink' – with developing countries hardest hit." ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))
19. **OECD / Reuters / Al Jazeera.** (2025). Ringkasan media tentang peringatan OECD terkait tarif, investasi AI, dan ketahanan pertumbuhan global. ([Reuters](#))
20. **Rodrik, D.** (2025). Wawancara dan ulasan tentang *Shared Prosperity in a Fractured World* dan gagasan rekonstruksi globalisasi. ([The New Yorker](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.1 Thinking, Access date: 4 December 2025. Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#) <https://chatgpt.com/c/693270dd-0650-8322-9a46-47e39b881c5f>)